

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBENTUKAN *RISK MANAGEMENT COMMITTEE*
Studi Empiris Perusahaan Non Finansial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2008-2011**

Ana Khusnun Safitri, Wahyu Meiranto¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the factors which influential the establishment of Risk Management Committee (RMC). There are two types of RMC, the one that combined with the audit committee and seperated from the audit committee. The factors that used in this research are board of director characteristic and firm characteristic that consist of proportion of independent commissioner, board size, board meeting, commissioner with accounting/finance expertise, and leverage, also firm size as control variabel.

Sample of this research were 204 samples from non financial companies listed in Indonesia Stock Exchange for the observation period of 2008 until 2011. Collecting data in this research used a purposive sampling method. This research used logistic regression to analyze data.

The results of this research indicated that firm size affected positively and significant with the establishment of RMC that combined with audit committee and separated RMC. The other variables (proportion independent commisioner, board size, board meeting, commisioner with accounting/financial expertise, leverage) have no significant association with the establishment of RMC that combined with audit committee and separated RMC.

Keywords: Corporate Governance, Risk Management Committee, Board of Commissioner Characteristics, and Firm Characteristics.

PENDAHULUAN

Peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, lembaga keuangan runtuh dan diselamatkan oleh pemerintah selama krisis keuangan global 2007-2008. Kegagalan lembaga-lembaga mengakibatkan pembekuan kredit pasar global dan intervensi pemerintah diperlukan di seluruh dunia. Sedangkan faktor-faktor ekonomi makro (misalnya, kebijakan moneter yang longgar) yang berada di akar krisis keuangan mempengaruhi semua perusahaan (Taylor, 2009), beberapa perusahaan terkena dampak lain lebih besar. Kejadian tersebut telah menarik perhatian investor dan regulator, tanpa memperhatikan penyebab kejadian tersebut karena pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) dalam jangka pendek (Kashyap *et al*, 2008) atau peningkatan level risiko pada perusahaan (Raber, 2003), sebagai penyebab timbulnya krisis (Tao dan Hutchinson, 2011).

Risiko merupakan suatu kondisi yang muncul akibat ketidakpastian (Hanafi, 2009). Risiko yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan kerugian bahkan perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Manajemen risiko merupakan cara yang dibutuhkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang mempengaruhi nilai perusahaan dan menerapkan suatu strategi yang luas untuk mengelola risiko tersebut dalam rangka membangun manajemen risiko yang efektif (Meulbroek, 2002), sebagai bagian terpenting untuk mewujudkan *good corporate governance*. Penerapan *corporate governance* dalam perusahaan, aspek pengawasan dalam pelaksanaan manajemen risiko menjadi faktor penting demi menciptakan sistem manajemen risiko perusahaan yang efektif, sehingga diperlukan peran Dewan Komisaris (Krus dan Orowitz,

¹Corresponding author

2009). Fama dan Jensen (1983) mengemukakan bahwa dewan komisaris adalah pembuat keputusan utama dalam organisasi. Selain itu, Dewan Komisaris dalam proses pengambilan keputusan harus memastikan fungsi *monitoring* telah berjalan efisien. Dewan Komisaris dalam tugasnya tanggung jawab dapat mendelegasikan tugas pengawasan risiko kepada komite pengawas manajemen yang sebagian besar diamanatkan pada Komite Audit (Krus dan Orowitz, 2009). Hal ini sesuai dengan lampiran keputusan Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai berbagai risiko dan pelaksanaan manajemen risiko serta pengendalian perusahaan. Dalam Pedoman Pembentukan Komite Audit yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Corporate Governance (KNKG) tahun 2002, menyatakan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah mengenai manajemen risiko dan kontrol perusahaan yang didalamnya juga mencakup identifikasi risiko dan evaluasi risiko untuk meminimalkan risiko.

Terdapat keraguan tentang Komite Audit mendapat tugas menangani manajemen risiko tetapi ada keraguan tentang keefektifan bahwa komite audit dapat menangani masalah risiko manajemen. Zaman (2001) menunjukkan bahwa tidak masuk akal untuk mengharapkan Komite Audit untuk bekerja pada tingkat yang lebih tinggi karena kurangnya keahlian dan waktu, terutama setelah tanggung jawab tambahan yang dikenakan pada mereka sesuai dengan prinsip *good corporate governance* yang menekankan pemisahan audit internal dari proses manajemen risiko. Menurut Krus dan Orowitz (2009), perusahaan memerlukan sebuah komite yang dapat memberikan waktu penuh untuk pengawasan manajemen risiko. Karena alasan ini beberapa perusahaan membentuk fungsi pengawasan yang terpisah dari audit dan secara khusus menangani pengawasan terhadap risiko perusahaan, yang disebut *Risk Management Committee* (RMC).

RMC merupakan komite yang dibentuk Dewan Komisaris yang bertanggung jawab menentukan strategi manajemen risiko, mengevaluasi operasi manajemen risiko, menilai pelaporan keuangan dan memastikan organisasi berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan (Desender, 2007). Dalam penerapannya, RMC dibagi menjadi dua jenis yaitu RMC yang berdiri sendiri (terpisah dari komite audit) dan RMC gabungan (tergabung dengan komite audit). RMC yang berdiri sendiri memiliki pengendalian internal yang lebih tinggi terhadap manajemen risiko dibandingkan ketika digabungkan dengan komite audit. Sedangkan RMC yang tergabung dengan Komite Audit tidak hanya mengawasi risiko melainkan juga terlibat aktif dalam pelaporan keuangan dan pengawasan fungsi audit (Alles, *et al.*, 2005 dalam Tazilah dan Rashidah, 2010).

Di Indonesia, pembentukan RMC mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dalam dunia perbankan, pembentukan RMC telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003. Akan tetapi berbeda dengan perusahaan dari sektor perbankan, pembentukan RMC di perusahaan non finansial masih bersifat sukarela (*voluntary*) dan belum ada peraturan yang mengatur tentang RMC tersebut. Sehingga semakin besar perhatian perusahaan mengenai pentingnya manajemen risiko dalam perwujudan *good corporate governance*, maka perusahaan dapat membentuk *Risk Management Committee* yang terpadu.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan sebagai hubungan antara *agent* (manajemen suatu usaha) dan *principal* (pemilik usaha). Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi wewenang kepada *agen* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal* (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan demikian, *agen* mempunyai lebih banyak informasi daripada pemilik usaha (*asimetri informasi*). *Asimetri informasi* membuat *agen* mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan yang memberikan keuntungan bagi *agen* sendiri.

Asimetri informasi menimbulkan dua permasalahan yaitu *Moral Hazard* dan *Adverse Selection*, dimana permasalahan yang melekat dalam hubungan *principal* dan *agen* dapat menimbulkan biaya keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Penerapan manajemen risiko dapat menurunkan biaya keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen risiko pada perusahaan juga dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan dalam menurunkan *asimetri informasi* dan berkontribusi dalam menghindari perilaku oportunistik dari manajer (Kajuter *et al.*, 2005).

Risiko dan Manajemen Risiko

Risiko merupakan suatu kondisi yang menyimpang dari sasaran yang ingin dicapai, yang disebabkan oleh ketidakpastian, sehingga mempunyai dampak yang sifatnya dapat merugikan perusahaan. Risiko berkaitan dengan *peril* dan *hazard*, dimana *Peril* yaitu suatu peristiwa yang dapat menimbulkan terjadinya suatu kerugian, dan *Hazard*, yaitu keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *Peril*. Dengan demikian, *hazard* lebih erat kaitannya dengan masalah kemungkinan dari pada masalah risiko, meskipun hal itu tidak dapat diabaikan dalam penanggulangan risiko (Djojosoedarso, 2003; 8-10). Risiko yang tidak pasti dan tidak dapat diabaikan, perusahaan memerlukan tindakan penanggulangan. Maka untuk mengurangi terjadinya risiko, diperlukan pengelolaan yang baik dalam bentuk pembentukan strategi dan pengawasan operasi oleh perusahaan. Dalam bisnis, pengelolaan terhadap risiko disebut manajemen risiko.

Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan / pengelolaan sumber daya (Shobrie, 2012). Manajemen risiko sebagai sebuah strategi dalam perusahaan untuk meningkatkan nilai (Suranaraya, 2003 dalam Gupta, 2011), dan juga dapat meningkatkan volatilitas laba, memaksimalkan nilai pemegang saham, dan meningkatkan keamanan keuangan organisasi (Lam, 2011 dalam Gupta, 2011).

Risk Management Committee

Dewan komisaris sebagai pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan dapat membentuk komite-komite yang membantunya dalam mengatasi masalah-masalah tertentu (FCGI, 2002). Salah satu komite yang dibentuk Dewan Komisaris adalah Komite Audit. Peran pengawasan manajemen risiko pada umumnya dibebankan kepada Komite Audit (Krus dan Orowitz, 2009). Namun perusahaan memerlukan suatu komite yang dapat memberikan perhatian secara penuh pada pengawasan risiko dan fokus tidak terbagi pada pemenuhan standar akuntansi agar mekanisme pengawasan risiko perusahaan dapat berjalan efektif (Krus dan Orowitz, 2009). Pentingnya pengawasan terhadap risiko dan peningkatan risiko bisnis yang dihadapi perusahaan menjadi salah satu faktor yang mendorong perusahaan untuk membentuk *Risk Management Committee*.

Risk Management Committee didefinisikan sebagai komite dibawah dewan komisaris yang memberikan pendidikan manajemen risiko pada tingkat dewan mengenai identifikasi dan strategi risiko yang tepat, implementasi pengelolaan risiko, dan *review* pelaporan risiko perusahaan (KPMG, 2001). RMC dalam pembentukannya terdiri dari RMC yang tergabung dengan Komite Audit dan RMC yang berdiri sendiri (terpisah dari Komite Audit). RMC yang berdiri sendiri memiliki pengendalian intern yang lebih tinggi daripada jika bergabung dengan Komite Audit. RMC yang tergabung dengan Komite Audit memiliki tugas pengawasan manajemen risiko, selain itu juga terlibat aktif dalam pelaporan keuangan dan pengawasan fungsi audit (Alles, *et al.*, 2005 dalam Tazilah dan Rashidah, 2010).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Risk Management Committee

Pembentukan RMC dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain Dewan Komisaris dan karakteristik perusahaan. Dewan Komisaris dalam peran pengawasan terhadap manajemen risiko tergantung karakteristik yang dimiliki Dewan Komisaris. Karakteristik Dewan Komisaris antara lain Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Frekuensi Rapat Dewan, dan Komisaris dengan Keahlian Akuntansi/keuangan. Selain itu pembentukan RMC juga dipengaruhi oleh faktor berasal dari karakteristik perusahaan sendiri antara lain tingkat *leverage* dan ukuran perusahaan.

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pembentukan RMC

Dalam teori keagenan semakin banyak jumlah anggota Komisaris yang independen, maka semakin tinggi kualitas pengawasan terhadap Direktur Eksekutif. Proporsi Komisaris Independen di dalam suatu dewan merupakan sebuah indikator independensi dari dewan. Sebuah dewan dengan proporsi Komisaris Independen yang tinggi cenderung untuk menyediakan pengawasan yang lebih besar pada aktivitas manajemen risiko perusahaan (Yatim, 2009). Fama dan Jensen (1983)

berpendapat bahwa Komisaris Independen dengan jumlah yang lebih tinggi cenderung dapat meningkatkan kualitas pengawasan. Selain itu, sebuah dewan dengan proporsi Komisaris Independen yang besar akan lebih menyukai RMC yang berdiri sendiri atau terpisah dari Komite Audit karena pembentukan RMC yang terpisah akan lebih terfokus pada kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada perusahaan. Jika pengaruh proporsi Komisaris Independen semakin besar maka pembentukan RMC yang terpisah semakin kuat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

- H1(a) : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif dengan pembentukan RMC yang tergabung dengan Komite Audit.**
- H1(b) : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif dengan pembentukan RMC yang terpisah dengan Komite Audit.**

Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Pembentukan RMC

Ukuran dewan diyakini sebagai aspek pengambilan keputusan yang efektif. Ukuran Dewan Komisaris yang lebih besar akan memberikan kekuatan dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan teori agensi, Dewan Komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Sembiring, 2005). Semakin besar jumlah anggota Dewan Komisaris, semakin mudah untuk mengendalikan Chief Executives Officer (CEO) dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen (Coller dan Gregory, 1999). Hal ini juga merupakan mekanisme *corporate governance* yang penting untuk mengurangi biaya keagenan yang akan timbul (Dyaksa, 2012). Ukuran Dewan yang besar memiliki sumberdaya yang beraneka ragam sehingga memiliki kesempatan untuk mengkoordinir dan terlibat dalam komite yang dibentuk Dewan Komisaris salah satunya Komite Manajemen Risiko (Subramaniam, *et al.*, 2009). Oleh karena itu, ukuran dewan yang besar dengan tingkat sumber daya yang ditawarkan memungkinkan Dewan Komisaris membentuk RMC baik yang terpisah dari Komite Audit maupun yang tergabung dengan Komite Audit. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diusulkan berikut ini:

- H2(a) : Ukuran dewan berpengaruh positif dengan pembentukan RMC yang tergabung dengan Komite Audit.**
- H2(b) : Ukuran dewan berpengaruh positif dengan pembentukan RMC yang terpisah dengan Komite Audit.**

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan terhadap Pembentukan RMC

Frekuensi rapat dewan berhubungan dengan ukuran waktu pertemuan antar dewan. Dalam teori keagenan, semakin sering waktu pertemuan maka Dewan Komisaris dapat mengontrol aktivitas perusahaan sehingga perusahaan dapat menghindari risiko dan mencapai tujuannya. Menurut Byrne (1996) dalam penelitian Liew, *et al.* (2012), intensitas rapat dewan berdampak terhadap keefektifan pengambilan keputusan dan secara potensial akan meningkatkan komunikasi antara direksi dan fungsi *internal control*. Intensitas aktivitas dewan seperti pertemuan dewan akan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen yang dapat merugikan perusahaan maupun *principal*. Komisaris untuk lebih memperhatikan risiko dan manajemen risiko yang akan diterapkan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan level pengawasan dan aktivitas manajemen risiko. Dengan demikian, semakin sering dewan menyelenggarakan rapat maka akan mendukung pembentukan RMC baik yang tergabung dengan Komite Audit maupun RMC yang terpisah. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

- H3(a) : Frekuensi rapat dewan berpengaruh positif dengan pembentukan RMC yang tergabung dengan Komite Audit.**
- H3(a) : Frekuensi rapat dewan berpengaruh positif dengan pembentukan RMC yang terpisah dengan Komite Audit.**

Pengaruh Komisaris dengan Keahlian Akuntansi/Keuangan terhadap Pembentukan RMC

Teori keagenan menekankan pentingnya penyerahan wewenang pengelolaan perusahaan dari pemilik kepada pihak lain yang mampu menjalankan perusahaan dengan lebih baik. Dengan

pengalihan wewenang kepada Komisaris yang kemampuan sesuai bidangnya, maka akan meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian perusahaan. Anggota dewan yang memiliki keahlian dan pengalaman akuntansi/keuangan dapat meningkatkan efektivitas peran Dewan Komisaris karena dapat memfasilitasi tugas identifikasi risiko dan penilaian risiko, yang mengarah ke perbaikan sistem manajemen risiko (Desender, 2009 dalam Liew, *et al.*, 2012), selain itu Dewan Komisaris dengan Keahlian Akuntansi/Keuangan dapat memberikan sumberdayanya untuk mengkoordinasi dan ikut berperan dalam komite-komite yang dibentuk Dewan Komisaris termasuk dalam tugas manajemen risiko. Dewan komisaris dan Komite Audit yang memiliki keahlian akuntansi/ keuangan dapat berkontribusi dalam pengawasan kinerja manajemen untuk menghindari kerugian yang diakibatkan oleh tindakan manajemen untuk melindungi perusahaan dan kepentingan *principal*. Sehingga Komisaris dengan keahlian Akuntansi/Keuangan dapat memainkan peran aktif dalam manajemen risiko, sehingga diharapkan dapat mendukung pembentukan RMC baik yang tergabung dengan Komite Audit maupun RMC yang terpisah. Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut:

H4(a) : Komisaris dengan keahlian Akuntansi/keuangan berpengaruh positif dengan pembentukan RMC yang tergabung dengan Komite Audit.

H4(b) : Komisaris dengan keahlian Akuntansi/keuangan berpengaruh positif dengan pembentukan RMC yang terpisah dengan Komite Audit.

Pengaruh *Leverage* terhadap Pembentukan RMC

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen dan Meckling, 1976). Perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi cenderung memiliki utang dan risiko yang tinggi. Semakin lama jatuh tempo utang semakin besar pula risiko tidak dikembalikan atau perubahan kondisiselama jangka waktu utang dan akan berdampak pada para pemegang saham sebagai *principal*. Hal ini akan mendorong pembentukan RMC sebagai mekanisme pengendalian internal yang tepat dan fungsi pengawasan risiko yang lebih efektif. Pembentukan RMC dapat meningkatkan kepercayaan kreditor dan pemegang saham, serta dapat membantu pengawasan dalam risiko laporan keuangan, sehingga dapat berjalan lebih efektif. Berdasar penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H5(a) : *Leverage* berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC yang tergabung dengan Komite Audit.

H5(b) : *Leverage* berpengaruh positif terhadap keberadaan RMC yang terpisah dengan Komite Audit.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembentukan RMC, yang terbagi dari pembentukan RMC dan pembentukan SRMC. Pembentukan RMC diukur dengan variabel dummy, dimana angka satu (1) adalah perusahaan yang membentuk RMC dan angka nol (0) adalah perusahaan yang tidak membentuk RMC. Pembentukan SRMC diukur dengan variabel dummy, dimana angka satu (1) adalah perusahaan yang membentuk RMC yang terpisah dari Komite Audit dan angka nol (0) adalah perusahaan yang tidak membentuk RMC terpisah dari Komite Audit atau perusahaan dengan RMC yang tergabung dengan Komite Audit.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Frekuensi Rapat Dewan, Komisaris dengan Keahlian Akuntansi/keuangan, *leverage*. Proporsi Komisaris Independen diukur dengan membagi jumlah anggota Komisaris Independen dengan jumlah anggota Dewan Komisaris. Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan menjumlah total anggota Dewan Komisaris. Frekuensi Rapat diukur dengan menjumlah jumlah rapat Dewan Komisaris selama satu tahun. Komisaris dengan Keahlian Akuntansi/keuangan diukur dengan jumlah Komisaris dengan Keahlian Akuntansi/keuangan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris. *Leverage* diukur dengan membagi total utang dengan total asset. Variabel kontrol dalam

penelitian ini adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total asset dalam laporan keuangan.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah dari keseluruhan kelompok individu yang menarik perhatian peneliti untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2008-2011.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dinilai dapat mewakili karakteristiknya. Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

- Perusahaan non finansial yang terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai dari tahun 2008 - 2011.
- Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan pada periode 2008 –2011.
- Terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari tahun 2008-2011.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan non finansial tahun 2008-2011. Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang berasal dari pojok BEI Universitas Diponegoro dan data *annual report* dan laporan keuangan yang diakses dari situs resmi BEI www.idx.co.id.

Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa *annual report* dan laporan keuangan auditan dari perusahaan non finansial yang listing dan dipublikasikan oleh BEI pada tahun 2008-2011.

Metode Analisis

Pada penelitian ini pengujian model dan hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Logit(RMC)} = \alpha + \beta_1(\text{INDDIR}) + \beta_2(\text{BRDSIZE}) + \beta_3(\text{MEETING}) + \beta_4(\text{EXPERT}) + \beta_5(\text{LEV}) + \beta_6(\text{SIZE}) + e$$

$$\text{Logit(SRMC)} = \alpha + \beta_1(\text{INDDIR}) + \beta_2(\text{BRDSIZE}) + \beta_3(\text{MEETING}) + \beta_4(\text{EXPERT}) + \beta_5(\text{LEV}) + \beta_6(\text{SIZE}) + e$$

Keterangan :

RMC	= Variabel <i>dummy</i> pembentukan RMC, dimana perusahaan yang memiliki RMC bernilai 1 dan 0 untuk sebaliknya.
SRMC	= Variabel <i>dummy</i> pembentukan RMC yang terpisah dari Komite Audit, dimana perusahaan yang memiliki RMC terpisah dari Komite Audit bernilai 1 dan 0 untuk sebaliknya.
α	= Konstanta
INDDIR	= Proporsi Komisaris Independen terhadap jumlah anggota Dewan Komisaris
BDSIZE	= Ukuran Dewan Komisaris
MEETING	= Frekuensi rapat Dewan Komisaris
EXPERT	= Komisaris dengan Keahlian Akuntansi/keuangan
LEV	= Total utang dibagi dengan aset
SIZE	= Ukuran perusahaan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2011. Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian dipilih dengan

purposive sampling. Berdasarkan *purposive sampling* diperoleh 51 perusahaan yang digunakan sebagai sampel selama 4 tahun penelitian, sehingga mendapat 204 sampel observasi.

Tabel 1
Proses Seleksi Sampel dengan Kriteria

Perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011	240
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan tahun 2008-2011	(91)
Perusahaan dengan data tidak lengkap terkait variabel penelitian	(98)
Sampel	51
Total Sampel 4 tahun	204

Sumber: Data Sekunder dari BEI, 2013

Deskripsi Variabel

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INDDIR	204	0,2000	0,8000	0,409896	0,1111351
BDSIZE	204	2,0000	11,0000	4,750000	1,8992480
MEETING	204	1,0000	31,0000	6,799020	5,1912961
EXPERT	204	0,0000	1,0000	0,388952	0,2067934
LEV	204	0,0005	7,6543	0,521042	0,5420157
SIZE	204	21,9410	32,6649	28,273339	1,8642500
Valid N (listwise)	204				

Sumber: Output SPSS, 2013

Variabel Proporsi Komisaris Independen (INDDIR) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,409896 atau 40%. Hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel telah memiliki lebih dari 30% Komisaris Independen yang diwajibkan dalam suatu Dewan Komisaris. Nilai terendah adalah 0,20 dan nilai tertinggi adalah 0,80 dengan standar deviasi sebesar 0,1111351.

Variabel Ukuran Dewan Komisaris (BDSIZE) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,75. Hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel memiliki anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang. Nilai terendah ukuran Dewan Komisaris adalah 2 dan nilai tertingginya adalah 11 dengan standar deviasi sebesar 1,89924.

Variabel Rapat Dewan Komisaris (MEETING) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 6,799. Hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel melakukan rapat sebanyak 6 kali dalam satu tahun. Nilai terendah rapat Dewan Komisaris adalah 1 dan nilai tertingginya adalah 31 dengan standar deviasi sebesar 5,1912.

Variabel Komisaris dengan Keahlian Akuntansi/keuangan (EXPERT) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,3889 atau 38,89%. Hal ini berarti rata-rata sampel memiliki Komisaris dengan keahlian Akuntansi/keuangan sebesar 38,89% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Nilai terendah adalah 0,00 dan nilai tertinggi adalah 1 atau 100% dengan standar deviasi sebesar 0,2067.

Variabel *Leverage* (LEV) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,521042 atau 52,10%. Hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel mempunyai rasio *leverage* sebesar 52,10%. Nilai terendah dari rasio ini adalah 0,0005 dan nilai tertingginya adalah 7,6543 dengan standar deviasi sebesar 0,5420157.

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 28,273339. Nilai terendah sebesar 21,9410 dan nilai tertinggi sebesar 32,6649 dengan standar deviasi sebesar 1,86425.

Pembahasan Hasil Penelitian

Metode regresi logistik dalam penelitian ini dinyatakan lolos dalam pengujian Multikolinearitas, pengujian Kelayakan Model Regresi, dan pengujian Keseluruhan Model Regresi.

Hasil penelitian menunjukkan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,180 atau 18% untuk model regresi I. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi pembentukan RMC sebesar 18%, sisanya dipengaruhi variabel lain diluar model penelitian.

Sedangkan hasil penelitian untuk model regresi II menunjukkan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,201 atau 20,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi pembentukan RMC sebesar 20,1%, sisanya dipengaruhi variabel lain diluar model penelitian.

Tabel 3
Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Logistik Model I

Hipotesis	Model	B	Sig.	Hasil
1a	INDDIR	-0,120	0,931	Ditolak
2a	BDSIZE	0,062	0,536	Ditolak
3a	MEETING	0,010	0,733	Ditolak
4a	EXPERT	-0,354	0,663	Ditolak
5a	LEV	-0,120	0,778	Ditolak
Control	SIZE	0,412	0,000	Diterima
	Constant	-11,996	0,000	

Sumber: Output SPSS dan data sekunder yang diolah, 2013

Tabel 4
Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Logistik Model II

Hipotesis	Model	B	Sig.	Hasil
1b	INDDIR	1,295	0,579	Ditolak
2b	BDSIZE	0,043	0,791	Ditolak
3b	MEETING	0,011	0,814	Ditolak
4b	EXPERT	0,944	0,057	Ditolak
5b	LEV	-2,529	0,085	Ditolak
Control	SIZE	0,349	0,037	Diterima
	Constant	-10,788	0,014	

Sumber: Output SPSS dan data sekunder yang diolah, 2013

Pengujian hipotesis menunjukkan variabel proporsi Komisaris Independen terhadap RMC diperoleh beta korelasi negatif sebesar 0,120 dengan signifikansi sebesar 0,931 yang berada di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan RMC. Dengan demikian Hipotesis 1a ditolak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel proporsi Komisaris Independen terhadap SRMC diperoleh beta korelasi positif sebesar 1,295 dengan signifikansi sebesar 0,579 yang berada di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap SRMC. Dengan demikian Hipotesis 1b ditolak.

Hasil penelitian ini juga serupa dengan penelitian Andarini (2010) dan Subramaniam, *et al.* (2009). Alasan dari tidak adanya pengaruh ini disebabkan oleh perbedaan pandangan bahwa Komisaris Independen dapat memberikan pemahamannya kepada perusahaan berkaitan dengan RMC (Liew, *et al.*, 2012) dan juga level Independensi Komisaris Independen yang tidak jelas karena Komisaris Independen tidak diikuti sertakan dalam pembuatan keputusan sehari-hari (Subramaniam, *et al.*, 2009).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris terhadap RMC diperoleh beta korelasi positif sebesar 0,062 dengan signifikansi sebesar 0,536 yang berada di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap RMC. Dengan demikian Hipotesis 2a ditolak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap SRMC diperoleh beta korelasi positif sebesar 0,043 dengan signifikansi sebesar 0,791 yang berada di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap SRMC. Dengan demikian Hipotesis 2b ditolak.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar Dewan Komisaris tidak menjamin pembentukan RMC. Hasil ini sejalan dengan penelitian Andarini (2010) yang menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris menjamin dibentuknya RMC maupun SRMC. Ukuran Dewan Komisaris yang besar memiliki sumber daya yang besar dan beraneka ragam, sehingga menyebabkan tugas

pengawasan terhadap risiko dapat dikendalikan dan dikelola oleh Dewan Komisaris itu sendiri. Hal ini untuk meminimalkan biaya keagenan, karena semakin banyak sumberdaya yang ada disuatu dewan atau komite maka biaya keagenan yang ditimbulkan akan semakin tinggi, sehingga untuk mengurangi biaya keagenan maka Dewan Komisaris cenderung akan memiliki jumlah anggota yang tidak terlalu besar. Ukuran dewan komisaris yang besar juga dapat menghambat efektivitas pengambilan keputusan, karena terlalu banyak ide yang dituangkan dan kesulitan dalam mencapai kesepakatan. Dengan alasan-alasan demikian, maka akan semakin kecil kemungkinan perusahaan membentuk RMC dan SRMC.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel frekuensi rapat dewan komisaris terhadap RMC diperoleh beta korelasi positif sebesar 0,10 dengan signifikansi sebesar 0,733 yang berada di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap RMC. Dengan demikian Hipotesis 3a ditolak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel frekuensi rapat Dewan Komisaris terhadap SRMC diperoleh beta korelasi positif sebesar 0,011 dengan signifikansi sebesar 0,814 yang berada di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap SRMC. Dengan demikian Hipotesis 3b ditolak.

Hasil tersebut mungkin disebabkan karena rapat yang diadakan dewan tidak membahas masalah pengawasan perusahaan melalui pembentuk RMC dan SRMC. Rapat yang diadakan cenderung membahas evaluasi terhadap kinerja keuangan maupun non keuangan Direksi dan tindakan pengawasan yang seperlunya dapat dilakukan Dewan Komisaris tanpa harus membentuk RMC dan SRMC. Dengan adanya rapat tersebut juga Dewan Komisaris dapat melakukan pengawasan langsung dan memaparkan kemungkinan risiko yang terjadi akibat dari tindakan manajemen, sehingga penanganan risiko sendiri dapat dilakukan bersama-sama dengan Direksi dan Dewan Komisaris hanya memantau saja.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel keahlian Akuntansi/keuangan Dewan Komisaris terhadap RMC diperoleh beta korelasi negatif sebesar 0,354 dengan signifikansi sebesar 0,663 yang berada di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Komisaris dengan keahlian Akuntansi/keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap RMC. Dengan demikian Hipotesis 4a ditolak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan keahlian Akuntansi/keuangan Dewan Komisaris terhadap SRMC diperoleh beta korelasi positif sebesar 0,944 dengan signifikansi sebesar 0,057 yang berada di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Komisaris dengan keahlian Akuntansi/keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap SRMC. Dengan demikian Hipotesis 4b ditolak.

Hal ini mungkin disebabkan karena Komisaris dengan keahlian Akuntansi/Keuangan terfokus pada pengawasan kinerja keuangan dari Direksi. Karena risiko yang erat terjadi pada perusahaan biasanya berkaitan dengan *leverage*, kompleksitas perusahaan dan ukuran perusahaan yang semakin besar, maka Dewan Komisaris melakukan pengawasan sebatas pada kinerja keuangan dan risiko yang kemungkinan timbul dari aktivitas keuangan tersebut. Sehingga mereka bisa melakukan pengawasan tanpa membentuk RMC maupun SRMC. Adanya Komisaris dengan Keahlian Akuntansi/Keuangan juga hanya untuk memenuhi kebijakan *corporate governance* perusahaan yang mewajibkan satu anggota Dewan Komisaris mempunyai latar belakang Akuntansi/Keuangan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel *leverage* terhadap RMC diperoleh beta korelasi negatif sebesar 0,120 dengan signifikansi sebesar 0,778 yang berada di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap RMC. Dengan demikian Hipotesis 5a ditolak. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel *leverage* terhadap SRMC diperoleh beta korelasi negatif sebesar 2,529 dengan signifikansi sebesar 0,085 yang berada di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap SRMC. Dengan demikian Hipotesis 5b ditolak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wahyuni (2012) dan Subramaniam (2009). Semakin tinggi proporsi hutang perusahaan maka perusahaan cenderung memangkas aktivitas yang dianggap kurang optimal (Wahyuni, 2012). *Leverage* yang tinggi membuat perusahaan untuk menghemat biaya yang timbul dari berbagai aktivitasnya (Andarini, 2010). Hal ini justru akan semakin menyurutkan perusahaan untuk membentuk RMC.

Variabel kontrol ukuran perusahaan dalam koefisien regresi model I (RMC) menunjukkan beta korelasi positif sebesar 0,412 dengan signifikansi 0,00 yang berada dibawah 0,05. Sedangkan ukuran perusahaan dalam koefisien regresi model II (SRMC) menunjukkan beta korelasi positif sebesar 0,349 dengan signifikansi 0,037 yang berada dibawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembentukan RMC maupun SRMC.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan RMC dengan indikator proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, keahlian akuntansi/keuangan dewan komisaris, leverage dan ukuran perusahaan. Berdasarkan hasil uji hipotesis sebagai berikut:

Pembentukan RMC (Hipotesis A):

1. Proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas perusahaan membentuk *Risk Management Committee*.
2. Ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas perusahaan membentuk *Risk Management Committee*.
3. Frekuensi rapat dewan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas perusahaan membentuk *Risk Management Committee*.
4. Komisaris dengan keahlian Akuntansi/Keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas perusahaan membentuk *Risk Management Committee*.
5. *Leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas perusahaan membentuk *Risk Management Committee*.

Pembentukan RMC yang Terpisah dari Komite Audit (Hipotesis B):

1. Proporsi Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas perusahaan membentuk *Risk Management Committee* yang terpisah dari Komite Audit.
2. Ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas perusahaan membentuk *Risk Management Committee* yang terpisah dari Komite Audit.
3. Frekuensi rapat dewan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas perusahaan membentuk *Risk Management Committee* yang terpisah dengan Komite Audit.
4. Komisaris dengan keahlian Akuntansi/Keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas perusahaan membentuk *Risk Management Committee* yang terpisah dari Komite Audit.
5. *Leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas perusahaan membentuk *Risk Management Committee* yang terpisah dari Komite Audit.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya. *Pertama*, *Risk Management Committee* merupakan isu yang masih baru dalam perusahaan non finansial. Isu yang baru tersebut menjadikan keterbatasan informasi dalam laporan tahunan. *Kedua*, Nilai *Nagelkerke R Square* yang masih rendah yaitu 0,180 atau 18% untuk RMC dan 0,201 atau 20,1% untuk SRMC yang dipengaruhi variabel-variabel independen dalam penelitian, sehingga masih ada variabel-variabel lain diluar model dalam penelitian yang berpengaruh terhadap *Risk Management Committee* dan *Risk Management Committee* yang terpisah dari Komite Audit.

Berdasarkan keterbatasan di atas terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. *Pertama*, selain menggunakan data sekunder, maka diperlukan data primer seperti kuisisioner dan wawancara agar diperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai *Risk Management Committee* dalam perusahaan. *Kedua*, menambah variabel lain yang lebih relevan dan memiliki pengaruh terhadap pembentukan *Risk Management Committee*.

REFERENSI

Andarini, Putri Wahyu dan Indira Januarti. 2010. "Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris dan Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risk Management Committee (RMC) Pada Perusahaan Go Public Indonesia". Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.

- Coller, P., and A. Gregory. 1999. "Audit Committee Activity and Agency Costs". *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol 18, No.4-5, pp 311-332.
- Desender, K. 2007. "On the Determinants of Enterprise Risk Management Implementation", Spain: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Djojosoedarso, Seisno. 2003. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dyaksa, H.P. 2012. "Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Keberadaan Risk Management Committee". *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Fama, E.F, dan Jensen, M.C. 1983. "Separation of Ownership and Control". *Journal of Law and Economics*, Vol. 26, No. 2, pp.301-326.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2002. *Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*. Jilid II.
- Gupta, P.K. 2011. "Risk Management in Indian Companies: EWRM Concerns and Issues". *Journal of Risk Finance*, Vol.12, No.2, pp.121-139.
- Hanafi, Mamduh. 2009. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hardhi, Shobrie. 2012. "Manajemen Risiko". Diakses tanggal 27 Maret 2013, dari Slideshare.
- Jensen, Michael C& W.H Meckling. (1976). "Theory of the Firm : Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure". <http://papers.ssrn.com> , diakses tanggal 3 Januari 2013.
- Kajüter, P., Kulmala, H., 2005. "Open-book accounting in networks.Potential Achievements and reasons for failures". *Management Accounting Research* No. 16, pp. 179-204.
- Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Jakarta.
- Komite Nasional Corporate Governance.2002. *Pedoman Pembentukan Komite Audit*. Jakarta.
- KPMG. 2001. "Enterprise Risk Management : an Emerging Model for Building Stareholder Value". [http:// www.kpmg.com](http://www.kpmg.com) , diakses tanggal 12 Januari 2013.
- Krus, Cynthia. M. dan Hannah L. Orowitz. 2009. "The Risk-Adjusted Board: How Should the Board Manage Risk". *Corporate Governance Advisory*, Vol.17 No.2, .pp.1-35.
- Liew, C.L., Zain, M.M., Jaffar, N. 2012 "Board of Directors and Voluntary Formation of Risk Management Committee:Malaysia Evidence". *International Journal on Sosial Science Economics & Art*, Vol. 2, No. 2, pp. 67-73.
- Meulbroek, L. 2002. "A Senior Manager's Guide to Integrated Risk Management". *Journal of Applied Corporate Finance*. Vol. 14, No. 4, pp. 56-70.
- Kashyap, A., Rajan, R., Stein, J., 2008. "Rethinking capital regulation". Working paper.
- Peraturan Bank Indonesia. Nomor: 5/8/Pbi/2003. Tentang.Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.Gubernur Bank Indonesia.

- Raber, R. W. 2003. "The role of good corporate governance in overseeing risk". *Corporate Governance Advisor*, Vol.11, No.2, pp.11-1.
- Sembiring, E.R. 2005. "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di BEJ". *Simposium Nasional Akuntansi 8*. Solo,15-16 September.
- Subramaniam, N., McManus, L., Zhang, J., 2009. "Corporate Governance, Firm Characteristics and Risk Management Committee Formation In Australian Companies". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24 Iss: 4, pp.316 – 339.
- Tazilah, Mohd Danial Afiq Khamar, Rashidah, Abdul Rahman. 2010. "Risk Management & Corporate Governance Characteristics in the Malaysian Islamic Financial Institutions". Research Paper.
- Tao, Ngoc Bich, Hutcinson, Marison. 2011. "Corporate Governance and Risk Management: The role of risk and compensation committees". <http://paper.ssrn.com> diakses tanggal 20 April 2013.
- Taylor, J. 2009. "The financial crisis and the policy responses: An empirical analysis of what went wrong". Working paper.
- Wahyuni, T., Harto, P., 2012, "Analisis Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko", *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 1, No. 2, pp. 1-12.
- Yatim, P., 2009, "Audit Committee Characteristics and Risk Management of Malaysian Listed Firms", *Malaysian Accounting Review*, Vol. 8, No. 1, pp. 19-36.
- Zaman, Mahbub. 2001. "Generating undue expectations of the corporate governance Role of audit committee". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 10, no 1, pp 5-9.